

**PENGARUH BELANJA OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL
TERHADAP DISTRIBUSI PENDAPATAN DI KOTA KEDIRI**

Melinda Wirastiti

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
melindawirastiti0504@gmail.com

I Made Suparta

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
madesuparta@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study examines the effect of operational expenditure and capital expenditure on income distribution in Kediri City during the 2020–2024 period. Income distribution is measured using the Gini ratio as an indicator of inequality, while operational and capital expenditures represent local fiscal policy within the regional budget (APBD). The study adopts a quantitative methodology and applies multiple linear regression techniques using secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS), the Directorate General of Fiscal Balance of the Ministry of Finance, BPPAKD of Kediri City, and Satu Data Kota Kediri. The estimation results indicate that operational expenditure and capital expenditure, both jointly and individually, do not exhibit statistically significant effects on income distribution. Operational expenditure is characterized by limited redistributive capacity, while capital expenditure displays a positive coefficient, implying that increased public investment and infrastructure spending have not yet translated into a more equitable distribution of income, particularly for lower-income segments. These findings suggest that the redistributive function of the Kediri City regional budget remains weak and highlight the need to reorient public expenditure toward more inclusive and pro-poor fiscal interventions.

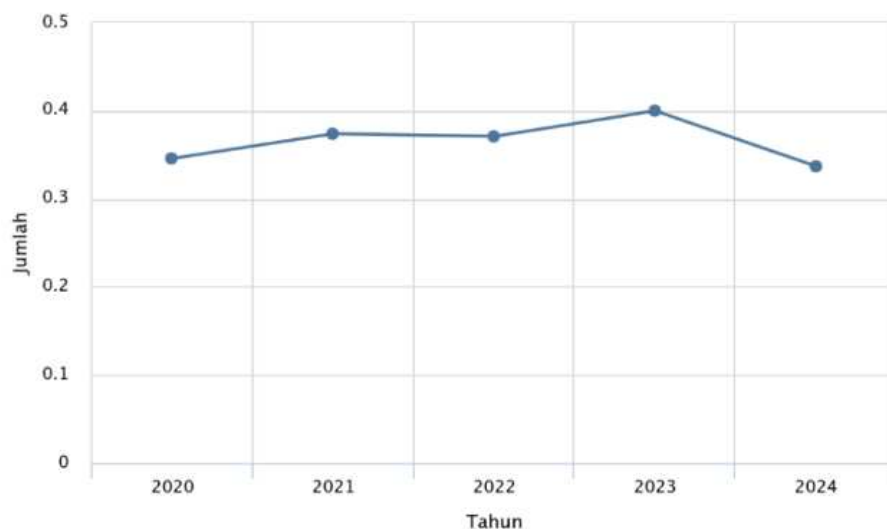
Keywords: *Operational Expenditure, Capital Expenditure, Income Distribution, Gini Ratio, Regional Budget.*

A. PENDAHULUAN

Pemerataan pendapatan merupakan salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi karena memiliki peran penting dalam terciptanya stabilitas sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta keberkelanjutan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. World Bank Group (2020) menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi, layanan publik, dan kesempatan kerja, sehingga menurunkan kinerja efektivitas pembangunan secara agregat. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik Indonesia (2025), mengenai ketimpangan pendapatan umumnya diukur menggunakan Indeks Gini atau Gini Rasio yang mencerminkan derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah dan menjadi indikator yang banyak digunakan dalam analisis kebijakan publik.

Di Indonesia, ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan struktural meskipun berbagai indikator makroekonomi menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan penurunan tingkat kemiskinan belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan yang signifikan. Indeks Gini Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada pada kategori ketimpangan sedang, yang menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum terdistribusi secara merata. Menurut UU RI Nomor 33 (2004) dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengurangi ketimpangan melalui pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), khususnya melalui kebijakan belanja publik yang diarahkan untuk memperkuat fungsi distribusi pendapatan.

Pada tingkat regional, Kota Kediri menunjukkan dinamika distribusi pendapatan yang berfluktuasi selama periode pengamatan. Berdasarkan Satu Data Kota Kediri (2025) data Gini Rasio Kota Kediri memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan tidak mengalami penurunan yang konsisten, meskipun kapasitas fiskal daerah dan realisasi belanja pemerintah cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja daerah tidak secara otomatis berdampak pada perbaikan pemerataan pendapatan. Fluktuasi ketimpangan tersebut mencerminkan adanya keterbatasan efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam menjalankan fungsi redistribusi, sehingga perlu dikaji lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhinya.



Gambar 1.1 Indeks Gini Kota Kediri

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2025

Berdasarkan pada Gambar 1.1 diatas, terdapat visualisasi fluktuasi Indeks Gini Kota Kediri dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Berdasarkan grafik secara jelas menunjukkan puncak ketidakmerataan yang terjadi pada tahun 2023 yang mencapai angka 0,400 sehingga dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi, dan tren tersebut kemudian diikuti oleh penurunan yang tajam pada tahun 2024. Dinamika non-linear ini menegaskan bahwa adanya pergerakan ketimpangan yang tidak stabil

di Kota Kediri, menjadi inti permasalahan empiris dalam penelitian ini.

Secara teoretis, belanja operasional dan belanja modal merupakan dua komponen utama APBD yang memiliki peran penting dalam fungsi alokasi dan distribusi keuangan publik. Belanja operasional diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan layanan publik, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja sosial. Sementara itu, belanja modal mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan aset publik yang diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas kedua jenis belanja tersebut dalam mengurangi ketimpangan pendapatan sangat bergantung pada komposisi belanja, kualitas pelaksanaan program, serta ketepatan sasaran kebijakan fiskal yang diterapkan.

Struktur belanja daerah Kota Kediri selama periode penelitian menunjukkan dominasi belanja operasional, khususnya belanja pegawai dan belanja rutin administratif. Sementara itu, belanja modal cenderung bersifat fluktuatif dan pada beberapa tahun terkonsentrasi pada proyek pembangunan tertentu. Kondisi ini berpotensi membatasi daya redistribusi APBD, karena belanja operasional yang bersifat rutin umumnya memiliki dampak tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Di sisi lain, belanja modal yang belum merata berisiko lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu, sehingga manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara inklusif.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh belanja pemerintah terhadap distribusi pendapatan menunjukkan temuan yang beragam. Sejumlah studi yang dilakukan oleh Sutiono (2018), Yasni dan Yulianto (2020) menemukan bahwa belanja operasional dan belanja modal dapat berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan apabila dikelola secara efektif dan berorientasi pada kelompok miskin. Namun, penelitian lain yang Chusainy et al. (2023), Primadani dan Yasa (2021) menunjukkan bahwa belanja publik justru dapat memperlebar ketimpangan apabila lebih banyak dialokasikan pada belanja rutin atau proyek pembangunan yang tidak inklusif. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, terutama pada tingkat pemerintah daerah dengan karakteristik fiskal dan ekonomi yang berbeda-beda, khususnya pada kota menengah seperti Kota Kediri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengaruh belanja operasional dan belanja modal terhadap distribusi pendapatan di Kota Kediri selama periode 2020–2024. Temuan penelitian ini diharapkan mampu menyajikan bukti empiris yang lebih relevan secara kontekstual terhadap efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendorong pemerataan pendapatan, serta berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi belanja publik secara lebih inklusif dan berorientasi pada pengurangan ketimpangan ekonomi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan fiskal daerah menempati posisi strategis dalam upaya pemerintah daerah untuk mengarahkan dinamika perekonomian sekaligus memengaruhi pola distribusi pendapatan masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui mekanisme perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

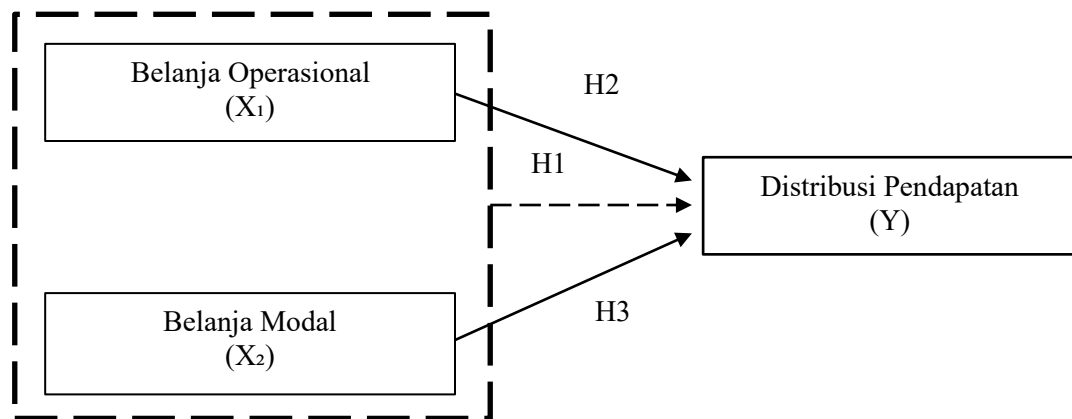
sebagai instrumen utama pengelolaan keuangan daerah. Menurut Musgrave dan Musgrave (1989) dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas belanja publik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Rosen dan Gayer (2008) mengatakan APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi alokasi sumber daya, stabilisasi perekonomian, dan distribusi pendapatan. Sebagai instrumen fiskal, APBD memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pengalokasian sumber daya yang efisien dan berkeadilan. Oleh karena itu, belanja daerah tidak hanya dinilai dari besarnya anggaran, tetapi juga dari kemampuannya dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Belanja operasional merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk mendukung aktivitas rutin penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan layanan publik, termasuk belanja pegawai serta belanja barang dan jasa (Kementerian Keuangan, 2023). Secara teoritis, Musgrave dan Musgrave (1989) mengatakan belanja operasional dapat berkontribusi terhadap pemerataan pendapatan apabila dialokasikan pada program-program yang bersifat redistributif seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun, dominasi belanja pegawai dan belanja administratif cenderung memiliki daya redistribusi yang terbatas karena manfaatnya lebih terkonsentrasi pada aparatur pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan belanja operasional sering kali tidak berdampak signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.

Belanja modal mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur fisik serta pengadaan aset publik yang bersifat jangka panjang. Belanja ini secara normatif diarahkan untuk menciptakan fondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, belanja modal berpotensi menurunkan ketimpangan pendapatan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar dan layanan publik. Namun, Todaro dan Smith (2020) berpendapat bahwa dampak belanja modal terhadap distribusi pendapatan tidak selalu bersifat langsung dan sering kali memerlukan waktu yang relatif panjang. Selain itu, Primadani dan Yasa (2021) juga sepakat mengenai belanja modal yang terkonsentrasi pada proyek tertentu berisiko memberikan manfaat yang tidak merata dan bahkan dapat memperlebar ketimpangan pendapatan.

Distribusi pendapatan menggambarkan pola pembagian pendapatan antarindividu atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah dan menjadi indikator penting dalam menilai keadilan hasil pembangunan ekonomi (Todaro dan Smith, 2020). Ketimpangan distribusi pendapatan menunjukkan adanya perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan kerja serta peluang memperoleh pendapatan. Ketimpangan yang tinggi tidak hanya menimbulkan persoalan sosial, tetapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang melalui penurunan kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya mobilitas ekonomi masyarakat. Dalam kajian ekonomi pembangunan, ketimpangan pendapatan umumnya diukur menggunakan Gini Rasio yang merepresentasikan tingkat ketidakmerataan pendapatan dari kondisi pemerataan sempurna hingga

ketimpangan sempurna (Badan Pusat Statistik, 2025). Nilai Indeks Gini yang semakin tinggi mengindikasikan semakin besarnya tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi, sedangkan nilai yang lebih rendah mencerminkan distribusi pendapatan yang relatif lebih merata (World Bank, 2020).

Berbagai penelitian terdahulu dari Sutiono (2018) menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh belanja pemerintah terhadap distribusi pendapatan. Sejumlah studi lainnya Chusainy et al. (2023) menemukan bahwa belanja operasional dan belanja modal berpengaruh signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan apabila dikelola secara efektif dan inklusif. Namun, penelitian lain Primadani dan Yasa, (2021) menunjukkan bahwa belanja pemerintah tidak selalu memberikan dampak yang signifikan, bahkan dalam beberapa kasus berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan akibat dominasi belanja rutin dan belanja yang tidak *pro-poor*. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa dampak belanja publik terhadap distribusi pendapatan sangat kontekstual dan dipengaruhi oleh karakteristik fiskal serta struktur ekonomi daerah.



Gambar 2. Kerangka Konseptual

- H₁: Belanja operasional (X₁) dan belanja modal (X₂) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan (Y) yang diukur menggunakan gini Rasio di Kota Kediri.
- H₂: Belanja operasional (X₁) berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan (Y) yang diukur menggunakan gini Rasio di Kota Kediri.
- H₃: Belanja modal (X₂) berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan (Y) yang diukur menggunakan gini Rasio di Kota Kediri.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas yang bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan hubungan sebab-akibat antara belanja operasional dan belanja modal terhadap distribusi pendapatan masyarakat di Kota Kediri. Distribusi pendapatan diukur menggunakan Indeks Gini sebagai indikator ketimpangan, sedangkan belanja operasional dan belanja modal merepresentasikan kebijakan fiskal daerah dalam APBD. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk runtut waktu tahunan selama periode 2010–

2024 dengan jumlah observasi sebanyak 15 tahun. Data Indeks Gini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri, sementara data belanja daerah diperoleh dari laporan realisasi APBD yang dipublikasikan oleh BPPKAD Kota Kediri, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, serta portal Satu Data Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan analisis data metode regresi linier berganda dengan pendekatan time series untuk menguji pengaruh belanja operasional dan belanja modal terhadap distribusi pendapatan, baik secara simultan maupun parsial. Pemilihan regresi linier berganda didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Seluruh proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS, yang memungkinkan estimasi parameter regresi, pengujian signifikansi, serta interpretasi hasil analisis dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Teknik pengolahan dan analisis data ini dipilih untuk mengetahui pengaruh dari dua variabel independent, yaitu Belanja Operasional (X1) dan Belanja Modal (X2) terhadap variabel dependent yaitu Distribusi Pendapatan (Y).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a						
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error		Beta		
1	(Constant)	-.865	1.347		-.642	.534
	LOG_BO	-.066	.111	-.172	-.597	.562
	LOG_BM	.109	.074	.425	1.477	.168

a. Dependent Variable: LOG_GR

Berdasarkan Tabel 1.1 model analisis persamaan regresi linear berganda yang terbentuk dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

$$\text{LOG_GR} = -0.865 - 0.066 \text{ LOG_BO} + 0.109 \text{ LOG_BM}$$

- Konstanta, Hal ini ditunjukkan oleh koefisien sebesar -0,865 dengan nilai signifikansi > 0,534, yang berarti lebih besar dari 0,05.
- Belanja Operasional (Variabel LOG_BO), Hal ini ditunjukkan oleh koefisien sebesar -0,066 dengan nilai signifikansi > 0,562, yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa, setiap kenaikan 1% Belanja Operasional akan menurunkan Pertumbuhan Ekonomi riil sebesar sekitar 0.066%, dengan asumsi variabel lain konstan (*ceteris paribus*).
- Belanja Modal (Variabel LOG_BM), Hal ini ditunjukkan oleh koefisien sebesar 0,109 dengan nilai signifikansi > 0,168, lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa, setiap kenaikan 1% Belanja Modal akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi riil sebesar sekittar 0,109%, *ceteris paribus*.

Analisis Uji Simultan (Uji F)

Tabel 1 Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.004	2	.002	1.105	.365 ^b
	Residual	.018	11	.002		
	Total	.021	13			
a. Dependent Variable: LOG GR						
b. Predictors: (Constant), LOG BM, LOG BO						

F-hitung bernilai 1.105, dengan Signifikansi $0.3065 > 0.05$. Hasil uji ini menunjukkan bahwa secara simultan, Belanja Operasional (LOG_BO) dan Belanja Modal (LOG_BM) tidak berpengaruh signifikan terhadap Distribusi Pendapatan (LOG_GR) artinya, kombinasi antara besaran belanja operasional dan belanja modal yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri selama periode 2010–2024 belum mampu secara bersama-sama menjelaskan variasi peningkatan atau penurunan ketimpangan pendapatan.

Analisis Uji Parsial (Uji-T)

Tabel 2 Analisis Uji Parsial (Uji-T)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.865	1.347		-.642	.534
LOG_BO	-.066	.111	-.172	-.597	.562
LOG_BM	.109	.074	.425	1.477	.168
a. Dependent Variable: LOG GR					

Berdasarkan pada Tabel 4.10, menunjukkan bahwa hasil Uji T:

- a. Pengaruh Belanja Operasional (LOG_BO) terhadap Distribusi Pendapatan:

Koefisien Regresi $\beta_1 = 0.066$

Nilai $t = -0.597$

Nilai Sig. = $-0.562 > 0.05$

Maka secara parsial Belanja Operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap Distribusi Pendapatan (LOG_GR). Tanda koefisien negatif (-0.066) menunjukkan arah hubungan yang berlawanan yaitu semakin besar Belanja Operasional, kecenderungan Gini Rasio justru turun (ketimpangan menurun). Hal ini, dapat terjadi karena belanja operasional telah didominasi oleh belanja pegawai dan belanja rutin yang tidak langsung menyentuh masyarakat berpendapatan rendah. Tetapi hubungan tersebut tidak signifikan, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pola yang kuat atau konsisten.

b. Pengaruh Belanja Modal (LOG_BM) Terhadap Distribusi Pendapatan

Koefisien Regresi $\beta_1 = 0.109$

Nilai $t = 1.477$

Nilai Sig. = $0.168 > 0.05$

Berdasarkan hasil uji, dapat disimpulkan bahwa secara parsial belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan yang diukur menggunakan Indeks Gini (LOG_GR). Meskipun demikian, tanda koefisien regresi yang positif mengindikasikan bahwa peningkatan belanja modal cenderung diikuti oleh peningkatan tingkat ketimpangan pendapatan. Temuan ini menunjukkan bahwa kenaikan belanja modal belum sepenuhnya mampu menghasilkan pemerataan distribusi pendapatan, dan bahkan dalam periode tertentu justru berasosiasi dengan meningkatnya ketimpangan. Kondisi ini sejalan dengan fenomena empiris di Kota Kediri, di mana pada tahun 2023 realisasi belanja modal mencapai tingkat tertinggi, namun pada saat yang sama Indeks Gini justru meningkat hingga mencapai nilai 0,400, yang merupakan tingkat ketimpangan tertinggi selama periode pengamatan.

c. Persamaan Regresi Berdasarkan Uji Parsial (Uji T)

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh model regresi linear berganda:

$$\text{LOG_GR} = -0.865 - 0.066(\text{LOG_BO}) + 0.109(\text{LOG_BM})$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa:

- 1) Jika Belanja Operasional naik 1%, maka Gini Rasio turun 0.066%, namun tidak signifikan.
- 2) Jika Belanja Modal naik 1%, maka Gini Rasio naik 0.109%, namun juga tidak signifikan

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS, diperoleh kesimpulan yaitu Belanja Operasional (LOG_BO) tidak berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan. Belanja Modal (LOG_BM) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan. Kedua variabel secara individual belum mampu menjelaskan variasi Gini Rasio di Kota Kediri pada periode penelitian. Dengan demikian, upaya penurunan ketimpangan perlu mempertimbangkan variabel lain yang lebih dominan, seperti kualitas SDM, pertumbuhan sektor produktif, atau efektivitas program bantuan sosial.

Analisis Koefisien Determinan (R^2)

Tabel 3 Analisis Koefisien Determinan R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.409 ^a	.167	.016	.04002
a. Predictors: (Constant), LOG_BM, LOG_BO				

Berdasarkan tabel 4.11, dapat diperoleh nilai: R Square (R^2) = 0.167. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusinya sebesar 16,7% variasi yang terjadi pada Distribusi Pendapatan (LOG_GR) dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen,

yaitu Belanja Operasional (LOG_BO) dan Belanja Modal (LOG_BM). Sementara itu, sebanyak 83,3% variasi sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Variabel lainnya yaitu mencakup pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pendidikan dan kualitas SDM, struktur ekonomi (formal-informal), investasi swasta, program bantuan sosial, perubahan harga dan inflasi daerah. Nilai R^2 sebesar 16,7% menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan yang rendah dalam menjelaskan variasi ketimpangan pendapatan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan hasil pengujian hipotesis serta uraian pembahasan yang telah disampaikan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara simultan, belanja operasional dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan di Kota Kediri periode 2020–2024, menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah belum mampu menurunkan ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio.
2. Secara parsial, belanja operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan akibat dominasi belanja pegawai dan belanja rutin administratif yang memiliki daya redistribusi rendah.
3. Belanja modal juga tidak berpengaruh signifikan dan cenderung berarah positif terhadap ketimpangan, mengindikasikan bahwa pembangunan dan investasi publik belum memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anzira, R., Maulida, R., Bidadari, B., Haqiqi, E. F., Danil, T. M., & Amri, K. (2023). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Distribusi Pendapatan (Bukti Data Panel Kabupaten Kota di Aceh). *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari*, 8(2), 67–74. <https://doi.org/10.35870/jemensri.v8i2.3038>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025, January 15). *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2024*. <https://www.bps.go.id/Pressrelease/2025/01/15/2399/Gini-Ratio-September-2024-Tercatat-Sebesar-0-381.Html>.
- Badan Pusat Statistik Kota Kediri. (2025, 2 5). *Gini Rasio Kota Kediri*. Diambil kembali dari [kedirikota.bps.go.id: https://kedirikota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzMzIzI=/gini-rasio.html](https://kedirikota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzMzIzI=/gini-rasio.html)
- Chusainy, M. N., Hadi Priyono, T., Al Kadzim, M., Wahyu Prianto, F., Ekonomi dan Bisnis, F., Jember, U., & Kalimantan no, J. (2023). Pengaruh Belanja Modal, Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Disparitas Pendapatan di Kawasan Bakorwil V Jawa Timur. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Pembangunan*, 1(2). <https://jppw.jurnal.unej.ac.id/index.php/JPWP/article/view/40411>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenku RI. (2021, April 7). *Artikel KPKNL Lhokseumawe: Menakar Keadilan Sosial di Masa Pandemi*.

Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id.

- Gai, A. M., Arpan, Y., Poerwati, T., & Sir, M. M. (2024). *Ekonomi Pembangunan : Teori dan Praktik dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Global* (M. Mirsal, Ed.; IV). PT Media Penerbit Indonesia. <https://repository.mediapenerbitindonesia.com/224>
- Haryanto. (2008). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Pendekatan Kinerja)* (1st ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). McGraw-Hill Book Company.
- Primadani, N. P. I., & Yasa, I. N. M. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Disparitas Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 5.
- Pemerintah Kota Kediri. (2019, 10 24). *Profil Kota Kediri*. Diambil kembali dari www.kedirikota.go.id: <https://www.kedirikota.go.id/page/profil/4>
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2008). *Public Finance* (8th ed.). McGraw-Hill.
- Satu Data Kota Kediri . (2024, 10 10). *Realisasi Pendapatan Keuangan* . Diambil kembali dari satudata.kedirikota.go.id: https://satudata.kedirikota.go.id/data_dasar/index/212-realisasi-pendapatan?id_skpd=24
- Satu Data Kota Kediri. (2025). *Realisasi Belanja Keuangan*. Diambil kembali dari satudata.kedirikota.go.id: https://satudata.kedirikota.go.id/data_dasar/index/227-realisasi-belanja
- Sutiono, F. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2010-2015). *Jurnal Ilmiah (Skripsi)*.
- UU RI Nomor 33. (2004). *UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. https://ppid.unud.ac.id/img/admin/page_attc/24912b0a69066085b09dd6ce8b330bd0.pdf#:~:text=17,dan%20ditetapkan%20dengan%20Peraturan%20Daerah
- World Bank Group. (2020, January 30). *Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class*. Worldbank.Org.
- Yasni, R., & Yulianto, H. (2020). *Peran Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia*. 4(1).